

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola keuangan pemerintah yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas. Laporan keuanganyang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksud agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan pemerintah daerah. Format baru yang perlu dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah daerah agar terciptannya pemerintah yang bersih dan *good governance* adalah dengan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu

instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2012). Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bidang politik akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dibidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum juga pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Menurut Slamet (2005) tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Akuntabilitas kinerja secara baik sangat tergantung pada beberapa variabel di antaranya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar atau panduan untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara (Ghozali, 2003). Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu alasan tersebut adalah memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dan dapat dipercaya. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas.

SAP diterapkan dilingkup pemerintah Pusat serta kementerian-kementriannya ataupun di pemerintah Daerah serta satuan kerja perangkat daerahnya. Penerapan SAP diyakini memberi dampak meningkatnya kualitas laporan keuangan di pemerintah Pusat serta Daerah (Sudaryo, 2017). Artinya bahwa dengan penerapan SAP yang sesuai, menjadikan informasi keuangan pemerintah bakal jadi dasar pengambilan keputusan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan sebaliknya.

Hal ini dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintah, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan standar akuntansi pemerintah sebagai landasan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan SAP bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pernah diteliti oleh Riyani (2022), Fitri (2017) dan Nungraeni (2015). Hasil penelitian juga bervariasi, ada yang berpengaruh positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Rayani (2022) menyatakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada kuantitas kinerja pemerintah. Fitri (2017) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nungraeni (2015) penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas sangat tergantung pada beberapa variabel di antaranya adalah pengawasan kualitas laporan keuangan. Pengawasan laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian

akuntabilitas departemen. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan akuntabilitas manajer (Kenis, 2009).

Pentingnya aspek Pengawasan kualitas laporan keuangan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas. Pengawasan kualitas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2009). Pentingnya aspek Pengawasan kualitas laporan keuangan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah.

Tujuan dilakukannya pengawasan kualitas laporan keuangan adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau faktor-faktor tidak tercapainya akuntabilitas dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitasnya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya Pengawasan kualitas laporan keuangan yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah (Mariah, 2013).

Penelitian tentang Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan pernah diteliti oleh Wina (2019), Fitri (2017) dan Sartika (2019). Hasil penelitian juga bervariasi, ada yang berpengaruh positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Wina (2019) menyatakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fitri (2017) pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sartika (2019) Tidak terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan menampilkan Opini BPK-RI yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Pada tahun 2019-2021 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diaudit oleh BPK-RI dan memberikan opini sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2019-2021

No	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1	2019	Wajar Dengan Pengecualian
2	2020	Wajar Dengan Pengecualian
3	2021	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: BPPAKD Provinsi NTT 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pemerintah daerah Kabupaten Kupang meraih predikat Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2019-2021 dalam laporan keuangan dengan paragraf penjabaran.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih menyanggah Predikat WDP dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kupang menyajikan saldo Aset Tanah, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Konstruksi dalam pengerjaan masing-masing senilai Rp97,09 miliar, Rp693,64 miliar, Rp1.019,22 miliar dan Rp57,35 miliar. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat kelemahan penegndalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian.
2. Aset dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2019 senilai Rp 18,31 miliar belum di catat pada Laporan Keuangan.

Pada Tahun 2020 juga masih sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih menyangand predikat WDP dengan permasalahan yang sama mengenai aset tetap yaitu Aset KDP sebanyak 150 unit senilai 36,83 miliar belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya, tidak sesuai kondisi riil dan di catat gabungan. serta lemahnya pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan

Pada tahun 2021 masalah yang masih menjadi pengecualian atas LKDP Kabupaten Kupang yaitu Aset Tetap yang terdiri :

1. Aset tetap tanah yang belum bisa dicatat, belum sesuai harga wajar dan aset tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaanya
2. Aset Tetap jalan irigasi dan jaringan yang belum dapat di telusuri keberadaanya.
3. Aset dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2019 senilai Rp 18,31 miliar belum di catat pada Laporan Keuangan.

4. Aset Tetap Kontruksi yang belum dapat di telusuri kejelasan status penyelesaiannya, dan tidak sesuai kondisi riil.

Dari penjelasan masalah tersebut dapat saya simpulkan bahwa penerapan akuntansi dan pengawasan berperan penting dalam kualitas laporan keuangan, yang dimana dicerminkan dalam hasil pemeriksaan BPK mengenai opini yang diberikan tiga tahun terakhir yaitu WDP yang secara tidak langsung menggambarkan manajemen tata kelola laporan keuangan tidak sesuai dengan standar dan karakteristik yang ditetapkan.

Berdasarkan urain latar belakang, fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aakuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aakuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kupang?

4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
2. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
4. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

2. Bagi Institusi

Diharapkan dapat memberi masukan bagi para penentu kebijakan di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pelimpahan wewenang yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif terhadap akuntabilitas manajerial hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi.

3. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti yang akan datang mengenai penerapan standar akuntansi, karakteristik tujuan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas manajerial.